



Dua Tahun Terima WTP

Pemkab Terus Evaluasi Asset Tetap

LANDAK, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak sudah dua tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Opini WTP ini diberikan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2013 dan 2014.

Namun demikian, Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot, menilai, berdasarkan pokok-pokok hasil pemeriksaan 2014 terdapat beberapa catatan. Catatan tersebut terkait dengan pengelolaan asset tetap, yang masih memerlukan upaya perbaikan secara periodik dan berkelanjutan.

"Ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi setiap SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemkab Landak," ujar Bupati Adrinanus, belum lama ini.

Untuk itu, dikatakan, upaya inventarisasi dan penilaian asset tetap serta verifikasi dan rekonsiliasi atas pencatatan asset daerah secara periodik perlu dilakukan. "Secara terus menerus harus dila-



TRIBUN FILE

” Secara terus menerus harus dilakukan, dan ditingkatkan agar pengelolaan asset semakin lebih baik. ”

ADRIANUS ASIA SIDOT
Bupati Landak

kukan, dan ditingkatkan agar pengelolaan asset semakin lebih baik," kata Adrianus.

Catatan lainnya, dikatakan, Bupati, masih terdapat kelemahan pada sistem pengendalian intern. Hal itu, dikatakan, terutama pada penyajian data piutang PBB-P2 yang masih perlu dilakukan validasi dan verifikasi, pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan keuangan BLUD yang belum memadai.

"Masih terdapat kesalahan penganggaran belanja pada beberapa SKPD, serta pengelolaan dan pengamanan asset tetap yang masih belum memadai. Jadi perlu upaya inventarisasi, dan penilaian

atas seluruh asset tetap Pemkab Landak," harapnya.

Di samping itu, dikatakan, harus terus melakukan rekonsiliasi atas penyajian asset tetap dengan SKPD terkait secara terus menerus dan berkelanjutan. Dalam hal kepatuhan, terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pemeriksa masih menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan. Terhadap peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan APBD Landak. Untuk ke depannya, kondisi ini tentunya perlu diperbaiki," pungkasnya. (alf)